



Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)

Nurkumala Sari, Risna Dewi

Prodi Administrasi Publik, Universitas Malikussaleh, 24351, Indonesia

ARTICLE INFORMATION

Received: February 08, 2022
Revised: Mei 20, 2022
Available online: June 30, 2023

KEYWORDS

Implementation, Policy, Zoning System, Acceptance of New Students

CORRESPONDENCE

Name: Risna Dewi
E-mail: risna.dewi@unimal.ac.id

A B S T R A C T

Problems in research on the implementation of the zoning system policy at four state senior high schools (PPDB) have not yet been adequately communicated to the community in regards to the zoning system policy. This study aims to investigate and comprehend the implementation of the PPDB zoning system policy. This method is qualitative in nature. Interviews, observation, and documentation are techniques for collecting data. Communication-wise, the implementation of the zoning policy in SMA Negeri 4 Kisaran has not been optimal. The dissemination of information has been limited to banner placement and social media sharing. In addition, the socialization period ended just one week before the new student admission (PPDB) registration opened. However, SMA Negeri 4 Kisaran's resources, including human resources, facilities, and financial funding, are already quite adequate. The school principal selects human resources, such as the PPDB organizing committee, based on their skills and knowledge. BOS funds provide the financial resources for implementing the zoning policy. The infrastructure and facilities at SMA Negeri 4 Kisaran are already adequate. It is deemed adequate in terms of the disposition and attitude of the implementers, including the appointment of bureaucrats and the incentives provided to them. This is evident in the dedicated service provided by the PPDB organizing committee, which provides detailed explanations to the community visiting the registration site and addresses other issues pertaining to the admission of new students. In addition, the incentives offered to implementers of the zoning policy for conducting the PPDB in SMA Negeri 4 Kisaran are deemed adequate.

PENDAHULUAN

Kebijakan sistem zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) merupakan suatu kebijakan yang ditempuh oleh Permendikbud Nomor 44 Tahun 2019 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah kejuruan, kebijakan sistem zona dibuat dengan tujuan agar peserta didik memperoleh pemerataan akses terhadap sumberdaya pendidikan. Kebijakan publik adalah segalanya dinyatakan oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak diperbaiki (Niken et al. 2021).

Policy diterjemahkan menjadi Kebijakan berarti segala sesuatu yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan. Dalam pengertian awam, publik berarti masyarakat umum, masyarakat umum dan pemerintah. Dengan demikian kebijakan publik selalu dikaitkan dengan keputusan pemerintah, ketetapan, kesimpulan atau langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah, yang dilakukan oleh organisasi pemerintah untuk ketertiban dan ketentraman (kesejahteraan) masyarakat (Thissen & Walker, 2013; Maruf & Rahmawati 2022).

Implementasi kebijakan merupakan tahapan terpenting dalam proses kebijakan publik (Yulek & Taylor, 2011). Sebuah program kebijakan harus dilaksanakan untuk memiliki dampak positif dan tujuan yang diinginkan harus dianalisis dan dievaluasi dengan hati-hati. (Nugroho, 2017) implementasi kebijakan memiliki implikasi *top-down* yaitu menginterpretasikan alternatif yang masih "abstrak" atau makro menjadi alternatif yang "konkrit", (Maruf & Rahmawati 2022).

Implementasi Kebijakan Publik Dampak Langsung dan Tidak Langsung Terhadap Implementasi menurut Edwards III ada empat variabel mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan, yaitu: 1. Komunikasi yang sukses, 2. Sumberdaya kebijakan yang konsisten, 3. Sikap birokrat dan pelaksana merupakan kepribadian dan karakteristik praktis.

Struktur birokrasi, yaitu struktur organisasi yang bertanggungjawab untuk melaksanakan kebijakan (Dr. Vladimir 2022).

Proses implementasi kebijakan membutuhkan kolaborasi pemangku kepentingan untuk mengkomunikasikan tujuan kebijakan, mengelola konflik, dan menyediakan sumberdaya (Sirait, 2021). Suatu usaha sadar dan terencana untuk membantu terciptanya suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kecerdasan, Oleh karena itu, setiap warga negara memiliki nilai dan motivasi yang sama. Maka pihak sekolah mempromosikan pendidikan, menjadikan pendidikan sebagai komponen penting untuk memastikan kesejahteraan semua bangsa.

Dalam rangka meningkatkan taraf hidup warga negara Indonesia, seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemerintah berkewajiban untuk menjunjung tinggi hak setiap warganya. Namun seperti yang terjadi, banyak anak di Indonesia yang tidak dapat bersekolah karena biaya sekolah yang tinggi dan persyaratan penjadwalan yang memberatkan untuk program pendidikan. Untuk mencapai hal tersebut, Pemerintah terus berupaya meningkatkan kualitas sistem pendidikan di Indonesia, dengan penciptaan sistem kebijakan zona baru sebagai sarana utama peningkatan untuk menghubungkan lingkungan sekolah dengan masyarakat, menghapuskan eksklusivitas dan diskriminasi di lembaga pendidikan khususnya, dan perguruan tinggi negeri, serta membantu analisis kebutuhan peserta didik dan pemerataan tenaga pengajar.

Kajian yang dilakukan oleh Purwanti et al. (2019) ini berfokus pada analisis kebijakan sistem penerimaan siswa baru di Kota Bandung, terutama dalam konteks penerapan sistem

zonasi. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi masalah yang menyebabkan kontroversi di masyarakat terkait kebijakan penerimaan siswa baru tersebut. Kajian ini mencakup empat aspek, yaitu keakuratan kebijakan, keakuratan implementasi, keakuratan target, dan keakuratan lingkungan. Masing-masing aspek ini menyoroti masalah yang terkait dengan kebijakan penerimaan siswa baru, baik dalam hal kebijakan itu sendiri maupun dalam pelaksanaannya. Kajian ini memfokuskan pada sistem pengajuan siswa baru di Kota Bandung dan masalah yang terjadi di dalamnya. Analisis dilakukan terhadap keakuratan kebijakan, implementasi, target, dan lingkungan untuk memahami kontroversi yang timbul dari kebijakan penerimaan siswa baru. Persamaannya dengan kajian peneliti yaitu Baik kebijakan akurasi, implementasi, target, maupun lingkungan, semuanya merupakan bagian dari evaluasi kebijakan penerimaan siswa baru. Kajian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan yang telah diterapkan dan mengidentifikasi masalah yang terkait dengan keakuratan kebijakan, implementasi, target, dan lingkungan. Kajian ini bertujuan untuk mengetahui penyebab kontroversi di masyarakat terkait kebijakan penerimaan siswa baru di Kota Bandung. Dalam upaya untuk memahami masalah ini, analisis dilakukan dari berbagai aspek kebijakan, pelaksanaan, tujuan, dan lingkungan.

Kemudian pada kajian yang dikemukakan oleh [Safitri dan Istiyono \(2022\)](#) berfokus pada dampak kebijakan sistem zonasi PPDB terhadap pemerataan mutu pendidikan di SMP Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Menggunakan metode kuantitatif dengan evaluasi kesenjangan, responden yang terlibat meliputi kepala sekolah, panitia PPDB, peserta didik, dan wali. Hasilnya menunjukkan bahwa kebijakan PPDB sistem zonasi tidak berdampak signifikan pada pemerataan mutu pendidikan di SMP Kabupaten Bantul. Penelitian ini juga menggambarkan pelaksanaan kebijakan dan menyimpulkan bahwa fasilitas pendukung pembelajaran di SMP Negeri Kabupaten Bantul sudah memadai.

Lain halnya yang dikemukakan oleh [Ariani \(2021\)](#) dalam Kajian Evaluasi implementasi kebijakan sistem zonasi PPDB di Kabupaten Tulungagung dan dampaknya terhadap efektivitas, efisiensi, ketersediaan, kesetaraan, responsivitas, dan akurasi. Kajian sebelumnya fokus pada dampak kebijakan sistem zonasi terhadap pemerataan mutu pendidikan di SMP. Metode Penelitian: Pendekatan deskriptif kualitatif dengan studi kasus ganda, melibatkan tiga sekolah sebagai objek penelitian. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif melalui wawancara dengan kepala sekolah dan operator PPDB. Kajian sebelumnya menggunakan pendekatan kuantitatif dengan model evaluasi kesenjangan. Penelitian Objek: Tiga sekolah sebagai objek penelitian, yaitu SMPN 2 Campur darat, SMPN 1 Tanggunggunung, dan SMPN 1 Besuki Tulungagung. Kajian sebelumnya berfokus pada penelitian di SMP di Kabupaten Bantul. Persamaan: Evaluasi implementasi kebijakan sistem zonasi PPDB dan dampaknya. Fokus pada Implementasi: Pelaksanaan kebijakan PPDB sistem zonasi dan dampaknya pada proses penerimaan peserta didik baru. Dukungan Sumber Daya Manusia: Persiapan sumber daya manusia yang memadai mendukung kelancaran implementasi kebijakan PPDB sistem zonasi.

Kemudian [Ismabela \(2020\)](#) mengungkapkan dalam Kajiannya adalah bertujuan untuk merefleksikan dan menjelaskan dampak penerapan sistem zonasi dalam

pendidikan.. Kajian ini menggunakan metode studi literatur dan survei, sementara kajian kedua menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Fokus Masalah: Kajian pertama menyoroti paradigma siswa dan orang tua yang mengabaikan belajar secara serius karena nilai ujian tidak digunakan dalam penerimaan ke tingkat sekolah baru. Kajian tersebut juga mencatat keengganan sekolah untuk berinovasi dan bersaing karena adanya sistem zonasi. Kajian kedua berfokus pada evaluasi implementasi kebijakan sistem zonasi dan dampaknya terhadap efektivitas, efisiensi, ketersediaan, kesetaraan, responsivitas, dan akurasi. Persamaannya Keterkaitan dengan Kebijakan Sistem Zonasi: Kedua kajian ini berhubungan dengan implementasi kebijakan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru. Dampak Sistem Zonasi: Kedua kajian ini menyoroti dampak penerapan sistem zonasi, termasuk masalah paradigma siswa dan orang tua, serta implikasi terhadap inovasi dan kompetisi antar sekolah. perlunya Pemantauan dan Revisi Kebijakan: Kedua kajian ini mencatat pentingnya pemantauan dan revisi kebijakan sesuai kebutuhan di lapangan.

Selanjutnya, kajian dari [Rachmadhany, Matin, dan Sugiarto \(2020\)](#) berfokus pada evaluasi implementasi kebijakan sistem zonasi di SMA Negeri Kota Bekasi. Menggunakan metode evaluasi kualitatif dengan model countenance yang dikembangkan oleh Stake, dan mengevaluasi kondisi lingkungan strategis, proses implementasi, dan hasil implementasi kebijakan penerimaan siswa baru menggunakan sistem zonasi di SMA Negeri Kota Bekasi. Kedua kajian bertujuan untuk mengevaluasi implementasi kebijakan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru. Implementasi kebijakan zonasi di Kota Yogyakarta. Partisipan Penelitian: Tidak disebutkan jumlah partisipan secara spesifik. Metode Penelitian: Metode kualitatif yang tidak dijelaskan secara rinci. Aspek Fokus: Bagaimana guru bahasa Inggris menghadapi tantangan akibat kebijakan zonasi. Hasil Penelitian: Budaya sekolah yang hangat dan akademis berhasil mengatasi keragaman kemampuan siswa. Kesamaan Kajian: Tujuan Kajian: Mengungkap bagaimana guru bahasa Inggris menghadapi perubahan akibat kebijakan zonasi. Metode Penelitian: Menggunakan metode kualitatif dengan wawancara guru bahasa Inggris. Hasil Penelitian: Guru bahasa Inggris mampu menghadapi tantangan dan pentingnya budaya sekolah yang hangat dan akademis.

Lalu, [Wardani dan Budiraharjo \(2020\)](#) dengan kajiannya tentang implementasi kebijakan sistem zonasi di SMA Negeri Kota Bekasi berada dalam kategori yang baik atau positif. mengidentifikasi dampak positif dan negatif dari implementasi kebijakan sistem zonasi, termasuk peningkatan kerjasama dan koordinasi antara sekolah dan masyarakat, pemecahan masalah yang lebih cepat, pengurangan risiko perjalanan siswa, peningkatan disiplin siswa, dan proses penerimaan yang lebih terbuka. Namun, juga terdapat dampak negatif seperti pengaruh lingkungan yang negatif pada siswa, kesulitan pendaftaran bagi siswa di luar zona sekolah, penurunan prestasi akademik, dan penurunan disiplin siswa.

Hal yang sama seperti diatas dalam penelitian [Iqbal, Haris, dan Niswaty \(2021\)](#) mengkaji implementasi kebijakan sistem zonasi dalam proses penerimaan siswa baru di Kabupaten Bulukumba. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan sistem zonasi di Kabupaten Bulukumba belum berjalan efektif. Beberapa faktor pendukung internal dan eksternal, termasuk kebijakan Permendikbud No.

1884/2285/VI/2020, telah mendukung implementasi kebijakan tersebut. Namun, ada beberapa faktor penghambat yang perlu diatasi, seperti kurangnya sarana dan prasarana ruang kelas. Selain itu, masih terdapat tantangan dalam pemahaman orang tua siswa terkait PPDB online, yang disebabkan oleh perbedaan jenjang pendidikan dan proporsi orang tua siswa. Selama pandemi COVID-19, keterlibatan langsung orang tua dalam sosialisasi PPDB online juga terhambat.

Implementasi sistem zonasi dalam kebijakan penerimaan siswa baru di SMP Negeri 10 Jember tahun ajaran 2019/2020 berjalan dengan baik sesuai petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Jember yang dikemukakan dalam penelitiannya [Ariswati \(2021\)](#). Proses penerimaan melibatkan jalur prestasi, jalur perpindahan tugas, dan jalur zonasi, dengan zonasi menjadi jalur utama. Opini publik mendukung kelanjutan kebijakan sistem zonasi dengan beberapa evaluasi yang membangun untuk perbaikan lebih lanjut.

Sedangkan penelitian yang diungkapkan oleh [Hoerudin \(2019\)](#) menunjukkan bahwa implementasi kebijakan sistem zonasi belum efektif secara umum di Indonesia. Oleh karena itu, evaluasi diperlukan untuk memperbaiki sistem agar penerimaan siswa baru berjalan dengan baik sesuai tujuan yang ditetapkan. Implementasi kebijakan sistem zonasi pada PPDB di Indonesia menggunakan metode kualitatif. Penerapan aturan PPDB dengan sistem zonasi dimulai pada tahun 2018 oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Tujuan sistem zonasi adalah memastikan akses pendidikan, memperkuat hubungan sekolah dan keluarga, mengurangi eksklusivitas dan diskriminasi, serta membantu perencanaan kebutuhan dan distribusi guru. [Saharuddin dan Khakim \(2020\)](#) dalam kajian Implementasi kebijakan sistem zonasi pada PPDB SMA di Daerah Istimewa Yogyakarta telah memenuhi variabel Van Meter dan Van Horn. Tujuan dan sasaran kebijakan telah dijalankan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sumber daya yang cukup, termasuk panitia PPDB dan sumber daya finansial, telah tersedia. Agen pelaksana kebijakan telah menyusun peraturan dan petunjuk teknis serta memberikan informasi kepada masyarakat. Terdapat disposisi implementor kebijakan, komunikasi antar organisasi pelaksana, dan lingkungan ekonomi, sosial, dan politik yang mendukung pemerataan akses layanan pendidikan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Kemudian dalam [Anggraeni, Helpiasuti, dan Wahono \(2022\)](#) Pemberlakuan sistem zonasi dalam pendidikan di Indonesia bertujuan untuk mengatasi ketimpangan pendidikan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan wawancara bersama Kabid Pembinaan SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi dalam implementasi kebijakan sistem zonasi pada PPDB SMP di Kecamatan Ponorogo berjalan baik. Hal ini didukung oleh regulasi seperti Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021, Permendikbud Nomor 51 Tahun 2021, dan Juknis PPDB. Komunikasi antara panitia Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo, pengawas sekolah, kepala sekolah SMPN 1 hingga SMPN 6, dan operator tim panitia terjalin dengan baik dalam pelaksanaan PPDB.

Penelitian yang dilakukan oleh [Hasballah dan Anam \(2019\)](#) telah mengevaluasi pemberlakuan kebijakan sistem zonasi pada PPDB SMP di Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan. Respon masyarakat terhadap kebijakan ini bervariasi, ada yang mendukung dan mengeluhkan, namun pada akhirnya mereka

pasrah pada kebijakan pemerintah. Implementasi kebijakan sistem zonasi didukung oleh regulasi seperti Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021, Permendikbud Nomor 51 Tahun 2021, dan Juknis PPDB. Komunikasi antara panitia Dinas Pendidikan Kabupaten Pamekasan, pengawas sekolah, kepala sekolah SMPN 1 hingga SMPN 6, dan operator tim panitia berjalan baik dalam pelaksanaan PPDB secara *online* maupun *offline*. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik wawancara tidak terpimpin, wawancara bebas terpimpin, dan teknik dokumentasi.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh [Urrahmi et al. \(2020\)](#) menunjukkan bahwa implementasi kebijakan dalam PPDB menggunakan sistem zonasi di SMP Negeri di Kota Padang dapat dikatakan cukup baik. Namun, terdapat beberapa faktor penghambat yang diidentifikasi. Pertama, terdapat perbedaan interpretasi kebijakan di kalangan masyarakat, yang menyebabkan kebingungan dan potensi resistensi. Kedua, terdapat kurangnya dukungan dan pemahaman yang berbeda di kalangan masyarakat, yang mempengaruhi kelancaran implementasi sistem zonasi. Selain itu, sistem sosialisasi bertingkat yang diterapkan oleh Dinas Pendidikan tidak mencapai potensi penuhnya, sehingga menyebabkan kesadaran dan pemahaman terbatas di kalangan para pemangku kepentingan. Terakhir, penundaan penerbitan instruksi teknis yang mendekati periode implementasi PPDB menghambat upaya sosialisasi yang efektif.

[Hariyati, Nunuk, dan Pangaribuan \(2019\)](#) dalam penelitiannya mengkaji implementasi kebijakan sistem zonasi pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) jenjang SMP di Kabupaten Gresik selama dua tahun dengan tujuan pemerataan kualitas pendidikan. Implementasi tersebut telah berjalan efektif, dengan potensi peserta didik yang semakin merata di wilayah tersebut. Namun, kendala yang dihadapi adalah kurangnya pemahaman wali murid terkait sistem zonasi karena latar belakang pendidikan yang beragam. Untuk mengatasi kendala ini, dilakukan sosialisasi yang lebih awal dan jelas kepada wali murid. Kesimpulannya, implementasi kebijakan sistem zonasi pada PPDB SMP di Kabupaten Gresik memberikan dampak positif dalam pemerataan kualitas pendidikan, tetapi perlu upaya lebih intensif dalam menjelaskan sistem zonasi kepada wali murid. Evaluasi dan perbaikan terus dilakukan untuk meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan kebijakan tersebut.

[Marini dan Bambang \(2019\)](#) dalam kajian Implementasi sistem zonasi pada Penerimaan Siswa Baru di SMA Negeri Kota Bandar Lampung, khususnya SMAN 9 dan SMAN 14, berjalan dengan baik. Namun, masih terdapat kendala seperti gangguan aplikasi, keterbatasan jaringan, pengaruh kuota di luar zonasi, dan pola pikir masyarakat terhadap sekolah unggulan. Perlu dilakukan evaluasi dan perbaikan secara terus-menerus untuk meningkatkan efektivitas sistem zonasi dan mengubah pola pikir masyarakat terkait kualitas sekolah unggulan.

Implementasi sistem zonasi di SMAN 1 Semarang pada tahap pelaksanaan menghadapi beberapa masalah yang ditemukan oleh [Aini, Ela Nur dan Wicaksono \(2020\)](#), namun melalui evaluasi yang dilakukan, masalah-masalah tersebut dapat diatasi. 2) Budaya berprestasi di SMAN 1 Semarang dikembangkan melalui pengoptimalan kegiatan intrakurikuler, ekstrakurikuler, dan suplemen intrakurikuler ekstrakurikuler. 3) Pendisiplinan siswa dilakukan dengan menggunakan strategi pengawasan hierarki, normalisasi, dan pengujian. Strategi ini

berdampak pada perbaikan dan perubahan dalam kedisiplinan siswa. Meskipun belum banyak memberikan kontribusi pada peningkatan prestasi, para guru optimis bahwa strategi ini dapat menjaga budaya berprestasi dalam jangka waktu yang lama

Sedangkan temuan dari Syafitri dan Fauzi (2021), implementasi kebijakan sistem zonasi dalam pemerataan pendidikan di Kecamatan Labang, Bangkalan, masih menghadapi kesenjangan dan kendala yang menghambat tercapainya tujuan tersebut. Kualitas pendidikan di kecamatan tersebut masih belum baik, dan jalur prestasi yang terbatas menyebabkan banyak peserta didik baru tidak dapat memasuki sekolah impian mereka. Untuk mencapai pemerataan pendidikan, diperlukan kerjasama antara struktur pemerintahan, masyarakat, pendidik, peserta didik, dan orang tua. Teori Struktural Fungsional digunakan dalam analisis fenomena penerapan sistem zonasi, yang dianggap memiliki aspek positif dan negatif bagi masyarakat. Evaluasi dan perbaikan terus menerus diperlukan dalam implementasi kebijakan sistem zonasi guna mencapai pemerataan pendidikan yang lebih baik di kecamatan tersebut.

Implementasi kebijakan sistem zonasi pada PPDB tingkat SMA di Daerah Istimewa Yogyakarta telah memenuhi enam variabel dalam model implementasi Van Meter dan Van Horn yang dikemukakan dalam penelitiannya Saharuddin dan Khakim (2020). Sasaran dan tujuan kebijakan sistem zonasi di DIY telah dijalankan, sumber daya telah tercukupi, karakteristik agen pelaksana telah memenuhi, disposisi dari implementor kebijakan telah ada, komunikasi antarorganisasi pelaksana terjalin baik, dan lingkungan ekonomi, sosial, dan politik mendukung pemerataan akses layanan pendidikan. Penelitian ini memberikan pemahaman lebih lanjut mengenai implementasi kebijakan sistem zonasi dalam PPDB SMA di DIY, yang dapat menjadi dasar untuk evaluasi dan perbaikan kebijakan di masa mendatang.

Berdasarkan observasi awal dalam kajian ini, penulis melihat para peserta adanya keramaian saat dibukanya Pendaftaran/Penerimaan Peserta Didik (PPDB) Baru SMA Negeri 4 Kisaran. Mengenai persyaratan penjelasan yang diperlukan serta mekanisme penerimaan calon mahasiswa baru, banyak calon mahasiswa baru yang mengalami kekurangan pemahaman (PPDB). Sosialisasi mengenai penerapan jalur zonasi tidak begitu sering dilakukan oleh pihak sekolah kepada masyarakat, maka orang tua calon peserta didik baru dan calon peserta didik baru akan mengalami kebingungan saat proses pendaftaran, (Observasi awal, 8/6/2021).

Tabel 1. Jumlah Pendaftar Peserta Didik Baru Melalui Jalur Zonasi, Tahun 2021

No	Tahun Diterima	Jumlah Pendaftar
1	2019	452 Orang
2	2020	301 Orang
3	2021	316 Orang

Sumber: KTU Sekolah SMA Negeri 4 Kisaran, 2021

Berdasarkan data tersebut diatas, jumlah pendaftar baru tahun 2019 kurang lebih 452 calon mahasiswa. Pada tahun pelajaran 2019 sosialisasi dilakukan oleh pihak sekolah dengan menghubungi sekolah-sekolah SMP yang berdekatan dengan

SMA Negeri 4 Kisaran untuk mensosialisasikan batas-batas zona dan aturan-aturan yang diperlukan untuk mengajukan permohonan.

Kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tingkat Sekolah Menengah Atas Negeri di Provinsi Sumatera Utara akan dilaksanakan pada bulan Juni 2021 dengan memanfaatkan mekanisme secara daring, baik mulai dari sesi pendaftaran, seleksi, hingga pengumuman kelulusan. Sebaliknya, dalam sistem yang ada, hal ini dilakukan melalui pemanfaatan zona, prestasi, baik akademik maupun non akademik serta jalur perpindahan orang tua dan jalur keluarga kurang mampu. Masalah lain yang disebutkan adalah fakta bahwa situs web sering mengalami kesalahan saat siswa baru melakukan pendaftaran secara online. Hal ini biasanya membuat siswa baru kurang antusias dalam mendaftar, sehingga ada beberapa siswa yang merasa harus menghubungi administrasi sekolah untuk meminta bantuan ketika situs web tidak berfungsi. Untuk mencegah diskriminasi lebih lanjut antar sekolah favorit, sistem zona lebih menekankan pada jarak atau radius antara tempat tinggal sarjana dengan sekolah yang diinginkan. Akreditasi SMA Negeri 4 Kisaran adalah A. membuat sekolah tersebut menjadi sekolah yang paling disukai siswa karena memiliki fasilitas belajar yang lengkap dan mendukung, antara lain ruang kelas, laboratorium komputer, ruang kelas untuk kerja kelompok, laboratorium, dan ruanglainnya. Selain itu, sejumlah pegawai SMAN 4 Kisaran yang berhasil menyelesaikan berbagai kejuaraan di berbagai bidang, baik akademik maupun non-akademik.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskriptif. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis deskriptif, yang melibatkan pengumpulan data, penyusunan, klarifikasi, penyusunan ulang, dan interpretasi data. Data yang digunakan bersifat deskriptif berupa kata-kata. Sumber data diperoleh melalui observasi dan penelusuran literatur. Pendekatan kualitatif memungkinkan penggalian yang mendalam dan rinci terhadap pengalaman dan perspektif individu yang terlibat dalam penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk memahami fenomena terkait penerapan Sistem Zonasi pada PPDB di SMA Negeri 4 Kisaran. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pemahaman tentang implementasi Sistem Zonasi dan dampaknya terhadap proses penerimaan peserta didik baru di sekolah tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan sumber data primer berupa wawancara dan observasi yang melibatkan penerapan sistem zonasi. Sumber data sekunder berupa data yang diperoleh tidak langsung dari narasumber melalui penelusuran literatur. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Proses analisis data dilakukan dengan model interaktif yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Kesimpulan yang dihasilkan bersifat preliminar dan perlu diverifikasi ulang di lapangan setelah proses analisis. Dalam penelitian ini, digunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskriptif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui model interaktif yang melibatkan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam memahami implementasi sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik

baru dan dampaknya terhadap kesenjangan dalam sektor pendidikan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi kebijakan dianggap sebagai tahap paling penting dalam proses kebijakan karena melibatkan pelaksanaan nyata kebijakan oleh para pelaksana kebijakan (Dunn, 2003; Dewi et al, 2021).

Implementasi kebijakan dalam struktur organisasi SMA Negeri 4 Kisaran melibatkan proses penerapan kebijakan yang telah ditetapkan oleh lembaga pendidikan tersebut. Kebijakan PPDB melibatkan penentuan kriteria penerimaan siswa baru, seperti jarak tempat tinggal, prestasi akademik, atau kegiatan ekstrakurikuler. Implementasi kebijakan ini membutuhkan koordinasi antara struktur organisasi, seperti kepala sekolah, panitia PPDB, dan dewan guru, untuk mengidentifikasi kriteria yang sesuai dengan tujuan dan kebijakan sekolah. Implementasi kebijakan PPDB melibatkan pengumuman dan penyebaran informasi terkait proses pendaftaran, persyaratan, dan tahapan seleksi kepada calon siswa dan orang tua. Staf administratif dan komite sekolah dapat bekerja sama untuk memastikan informasi yang jelas dan akurat disampaikan kepada masyarakat dan calon peserta didik baru. Implementasi kebijakan PPDB melibatkan penempatan siswa baru ke kelas atau program studi yang sesuai. Dewan guru dan panitia PPDB bekerja sama untuk mengatur penempatan siswa berdasarkan hasil seleksi dan kapasitas kelas yang tersedia.

Implementasi kebijakan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) di SMAN 4 Kisaran menghadapi beberapa tantangan yang dapat mempengaruhi efektivitasnya. Dalam konteks ini, komunikasi menjadi salah satu faktor penting yang harus dipertimbangkan dalam implementasi kebijakan. Komunikasi yang efektif dalam menyampaikan informasi tentang proses penerimaan, kriteria, dan persyaratan zona sangat penting untuk memastikan pemahaman yang baik dari masyarakat. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa sosialisasi dan komunikasi terkait jalur zona dalam PPDB tahun 2021 di SMAN 4 Kisaran belum dilakukan secara memadai. Meskipun pada tahun 2020 telah dilakukan sosialisasi kepada siswa kelas 3 SMP, pada tahun berikutnya sosialisasi tersebut tidak dilakukan lagi. Hal ini menunjukkan kurangnya upaya dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat secara keseluruhan.

Penelitian juga menemukan bahwa koordinasi antara anggota Komisi A DPRD Kabupaten Asahan, Dinas Pendidikan Kota Kisaran, dan SMA Negeri 4 Kisaran perlu diperkuat agar sosialisasi sistem zonasi dapat dilakukan dengan lebih efektif. Kurangnya koordinasi ini menyebabkan ketidaktahuan pihak sekolah mengenai batas wilayah zona yang ditetapkan. Oleh karena itu, perlu dilakukan koordinasi yang lebih baik antara semua pihak terkait untuk memastikan sosialisasi yang tepat dan menyeluruh.

Tabel 2. Skor Jarak Tempat Tinggal Calon Peserta Didik Baru dengan Satuan Pendidikan, Tahun 2021

No	Jarak Tempat Tinggal (Meter)	Skor
1	0000-1000	400
2	1001-2000	375
3	2001-3000	350
4	3001-4000	325

5	4001-5000	300
6	5001-6000	275
7	6001-7000	250
8	7001-8000	225
9	8001-9000	200
10	9001-10000	175
11	10001-11000	150
12	11001-12000	125
13	12000-	100

Sumber: Petunjuk Teknis PPDB SMA Negeri Provinsi Sumatera Utara Tahun Pelajaran 2021/2022

Skor jarak tempat tinggal calon peserta didik baru dengan satuan pendidikan adalah metode pengukuran yang digunakan untuk menentukan seberapa dekat atau jauhnya lokasi tempat tinggal calon siswa dengan sekolah atau satuan pendidikan yang dituju. Skor jarak tersebut dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam penerimaan siswa baru atau penempatan siswa dalam proses seleksi atau pengaturan jarak antara tempat tinggal calon siswa dan sekolah.

Kebijakan sistem zonasi dalam PPDB di SMAN 4 Kisaran memiliki karakteristik yang kompleks. Implementasinya melibatkan berbagai pihak, seperti pihak sekolah, pemerintah daerah, anggota DPRD, dan masyarakat. Kompleksitas kebijakan ini dapat menjadi faktor yang mempengaruhi kesulitan dalam implementasi. Salah satu faktor yang ditemukan dalam penelitian adalah kurangnya sosialisasi dan komunikasi yang efektif kepada masyarakat tentang jalur zona. Teori Edward III menekankan pentingnya komunikasi yang baik dalam implementasi kebijakan. Komunikasi yang jelas, terbuka, dan terus-menerus antara pihak-pihak yang terlibat dapat membantu memastikan pemahaman yang baik tentang kebijakan dan tujuannya. Kurangnya koordinasi antara pihak terkait, seperti anggota DPRD, Dinas Pendidikan, dan sekolah, juga menjadi hambatan dalam implementasi kebijakan. Teori Edward III menekankan pentingnya koordinasi yang baik antara berbagai pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan. Koordinasi yang kuat dan sinergi antara pihak-pihak terkait dapat meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan. Dalam konteks peningkatan sistem zonasi, peningkatan fasilitas pendidikan di setiap zona menjadi penting. Teori Edward III mengakui bahwa implementasi kebijakan dapat dipengaruhi.



Gambar 1. Visi & Misi SMA Negeri 4 Kisaran

Implementasi kebijakan akan mempertimbangkan visi dan misi sekolah sebagai acuan, dengan memastikan bahwa kebijakan yang diadopsi dan diterapkan sesuai dengan tujuan dan nilai-nilai yang ingin dicapai oleh SMA Negeri 4 Kisaran.

Kebijakan tersebut harus mendukung upaya untuk mencapai visi dan misi, mempromosikan kualitas pendidikan, dan meningkatkan hasil belajar siswa sesuai dengan arah yang ditetapkan oleh sekolah.

Ketersediaan sumberdaya yang memadai. Kekurangan fasilitas pendidikan di daerah pedesaan dapat menjadi hambatan dalam implementasi kebijakan zonasi. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk mempertimbangkan alokasi sumberdaya yang memadai untuk meningkatkan fasilitas pendidikan di zona-zona tersebut, Edward III dalam (Dr. Vladimir, 2022).



Gambar 2. Spanduk prestasi dalam bidang kompetisi sains nasional yang telah diraih oleh SMA Negeri 4 Kisaran



Gambar 3. Piala dan medali yang telah diraih oleh SMA Negeri 4 Kisaran

Prestasi akademik, olahraga, seni, atau lainnya, hal ini dapat meningkatkan daya tarik sekolah bagi calon siswa dan orang tua. Implementasi kebijakan PPDB dapat menjadi lebih penting karena jumlah pendaftar yang tinggi. Prestasi yang dicapai oleh sekolah dapat menjadi salah satu faktor pertimbangan dalam seleksi siswa baru. Implementasi kebijakan PPDB dapat menghadapi tingkat persaingan yang lebih tinggi. Banyak calon siswa berpotensi mendaftar ke sekolah tersebut, dan hal ini mungkin memerlukan kebijakan seleksi yang lebih ketat untuk memilih siswa yang paling berkualitas sesuai dengan criteria yang telah ditetapkan.

Sekolah dianggap terlalu teoretis, sehingga menyebabkan kesulitan pemahaman dan kemungkinan terjadinya kesalahpahaman. Hal ini dapat mengganggu komunikasi antara pelaksana kebijakan dan masyarakat. Pentingnya konsistensi informasi. Jika informasi yang diberikan terus berubah, maka akan menimbulkan kebingungan baik dari pihak pelaksana kebijakan maupun masyarakat luas. Konsistensi informasi yang jelas harus dijaga agar tidak terjadi masalah ketika kebijakan tersebut diterapkan.

SMA Negeri 4 Kisaran menggunakan media sosial sebagai sarana untuk menyebarkan informasi dan berkomunikasi dengan masyarakat terkait program PPDB dan masalah yang

terjadi dengan sistem berbasis zona. Hal ini bertujuan agar masyarakat dapat memahami dan melaksanakan persyaratan masuk melalui jalur perbatasan. Penggunaan media sosial dapat menjadi alat yang efektif dalam komunikasi dan sosialisasi, namun harus diimbangi dengan upaya lain seperti penggunaan website sekolah dan pembaruan informasi terkini.

Salah satu masalah yang dihadapi adalah kesulitan masyarakat dalam memahami maksud dan tujuan dari kebijakan ujian. Informasi yang diberikan oleh administrasi. Kendala dalam sosialisasi kebijakan sistem zonasi yang dihadapi oleh pihak sekolah. Kurangnya waktu yang dialokasikan untuk sosialisasi sebelum proses PPDB menjadi hambatan dalam memperkenalkan kebijakan ini kepada masyarakat. Komunikasi yang baik dan efektif merupakan faktor penting dalam melaksanakan suatu tugas, dan dalam hal ini, kendala tersebut harus diatasi agar sosialisasi kebijakan dapat dilakukan dengan lebih baik.

KESIMPULAN

Komunikasi yang jelas, konsistensi informasi, dan sosialisasi yang memadai dalam implementasi kebijakan sistem zonasi dalam PPDB di SMA Negeri 4 Kisaran. Langkah-langkah yang perlu dilakukan adalah meningkatkan kemudahan akses informasi melalui media sosial dan website sekolah, serta meningkatkan aktivitas dalam membagikan dan memperbarui informasi terkait PPDB kepada masyarakat. Selain itu, perlu dilakukan sosialisasi yang lebih intensif dan memadai sebelum proses PPDB dimulai, serta memperhatikan kejelasan dan kepraktisan informasi yang disampaikan kepada masyarakat agar dapat memahami dan mendukung kebijakan yang memudahkan akses informasi melalui media sosial dan website sekolah, serta aktif dalam membagikan dan memperbarui informasi terkait PPDB. Sosialisasi sebelum proses PPDB juga harus lebih intensif dan memadai, dengan memperhatikan kejelasan dan kepraktisan informasi yang disampaikan kepada masyarakat. Dengan demikian, komunikasi yang jelas, konsistensi informasi, dan sosialisasi yang baik dapat mendukung implementasi kebijakan sistem zonasi dalam PPDB di SMA Negeri 4 Kisaran.

REFERENSI

- Aini, Ela Nur dan Wicaksono, Harto. 2020. "Kontruksi Budaya Berprestasi: Studi Kasus Implementasi Sistem Zonasi SMA Negeri 1 Semarang." *Jurnal Solidarity* 9 (1)(1): 879-91. <http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/solidarity>
- Kontruksi.
- Anggraeni, Alun, Selfi Budi Helpiastuti, and Puji Wahono. 2022. "Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tingkat SMP Di Kecamatan Ponorogo." *Jurnal Pendidikan dan Konseling* 4(5): 5234-41.
- Ariani, Arieck Tri. 2021. "The Implementation of Zoning System in Suburban Schools in Tulungagung Regency, Indonesia." *Harmoni Sosial: Jurnal Pendidikan IPS* 7(2): 183-89.
- Ariswati, Yuvita. 2021. "The Implementation of Zoning System Policy on The Admission Process of New Student in Public Junior High School." *Ar-Rosikhun: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 1(1): 29-36.
- Dewi, Risna, Tommy Adista, and Safrida Safrida. 2021. "Implementasi Program Bantuan Dana Desa Di Tengah Pandemi Covid 19." *Jurnal Public Policy* 7(1): 36.

- Dr. Vladimir, Vega Falcon. 2022. "Implementasi Program Ekonomi Kerakyatan Di Desa Malenos Baru Kecamatan Amurang Timur Kabupaten Minahasa Selatan." *Gastronomia ecuatoriana y turismo local* 8(69): 42-48.
- Hariyati, Nunuk, and Elsa Nida Pangaribuan. 2019. "Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru Jenjang Smp Di Kabupaten Gresik." *Inspirasi Manajemen Pendidikan* 7(1): 1-12.
- Hoerudin, Cecep Wahyu. 2019. "Implementation of Admission Policy for New Student With Zonation Systems in Indonesia." *International Journal of Humanities and Social Sciences* 8(5): 17-23.
- Iqbal, Muhammad, Hasnawi Haris, and Risma Niswaty. 2021. "Implementation of the Zoning System Policy in Bulukumba Regency." *Jurnal Ad'ministrare* 8(1): 119-28.
- Ismabela, Juwita. 2020. "The Impact of Zoning System to Student Achievement and School Innovation." 387(Icei): 292-94.
- Marini, K., & Utoyo, B. (2019). Menimbang Kembali Kebijakan Sistem Zonasi Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru di Bandar Lampung. *Jurnal Administrativa*, 1(1), 87-100.
- Maruf, Kamal, and Diviani Rahmawati. 2022. "Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Subang." *Biomatika: Jurnal ilmiah fakultas keguruan dan ilmu pendidikan* 8(2): 237-44.
- Niken, Niken et al. 2021. "Implementasi Kebijakan Vaksinasi Covid-19 Di Kota Boyolali." *Jurnal Health Sains* 2(11): 2138-44.
- Purwanti, Dian, Ira Irawati, Herijanto Bekti, and Josy Adiwisastro. 2019. "Implementation of Zoning System Policy for New Students Admission." *Proceeding of International Conference on Social Sciences* 0(0): 2721-6888. <https://jurnal.umj.ac.id/index.php/ICSS/article/view/6463>.
- Rachmadhany, Fitri, Matin Matin, and Sugiarto Sugiarto. 2020. "Evaluation of Policy Implementation Admission New Students by Zonation System in Senior High School Bekasi District." *EDUTECH: Journal of Education And Technology* 4(2): 130-46.
- Safitri, Dhamar Widya, and Edi Istiyono. 2022. "The Impacts of Zoning System Policies of New Students' Admission on the Education Quality Equalization." *Journal of Education Research and Evaluation* 6(4): 619-28.
- Saharuddin, Erni, and Muhammad Salisul Khakim. 2020. "Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Tingkat Sma Di Daerah Istimewa Yogyakarta." *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara* 7(3): 424-38. <https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/dinamika/article/view/4226>.
- Sirait, Ferdinand Eskol Tiar. 2021. "Policy Communication and the Solidity of the Jokowi's Second Term Coalition in Handling Covid-19." *Jurnal Bina Praja* 13(2): 257-68.
- Syafitri, Eni, and Agus Mahfud Fauzi. 2021. "Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Dalam Pemerataan Pendidikan Di Sman 1 Kamal." *Equilibrium: Jurnal Penelitian Pendidikan dan Ekonomi* 18(01): 33-40.
- Urrahmi, Miftah et al. 2020. "Jurnal Mahasiswa Ilmu Administrasi Publik (JMIAP)." 2(2): 9-17.
- Wardani, Dyah, and Markus Budiraharjo. 2020. "Investigating Teacher Agency: Zoning Policy Implementation in Favorite and Non-Favorite Senior High Schools." *The Journal of Educational Development* 8(1): 18-25.